

Pleidooi
Drs. Bambang Beathors Suryadi
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
8 Maret 1990

Dear Luisa ~ Jose,
This student received
a 5 year sentence.
In his defence plea
he is openly pleading
for a plebiscit in
East Timor.
greetings
Liem

wanita-wanita yang .pa
tak berdosa itu.

Sebagai seorang yang beragama, apalagi Islam, tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi yang inheren. Beragama tidak sama dengan menganut aliran kepercayaan. Bagaimanapun aliran kepercayaan tetaplah bukanlah agama. Secara formal inipun diakui pula oleh Suharto. Tetapi dalam kenyataannya, kecenderungan mistik yang mati-matian ditolak oleh umat beragama justru menjadi bagian penting dari kepribadian Suharto. Dalam buku biografinya Suharto mengakui bahwa dirinya adalah seorang ahli kebathinan. Kegemaran Suharto dalam bidang kebathinan ini memang sudah menjadi rahasia umum. Dengan angkuh Suharto berkata bahwa ia lebih hebat dari Sudjono Humardani, dalam hal kebathinan.

Dalam setiap kesempatan, Suharto selalu menyediakan waktu untuk datang ke tokoh-tokoh kebathinan, untuk berguru. Sebagai salah seorang penganut aliran kepercayaan Suharto selalu menyempatkan diri hadir dalam forum-forum kebathinan; demikian juga ketika musyawarah kebathinan di Kaliurang, Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu. Ketika itu Suharto datang secara sembunyi-sembunyi. Entah karena apa? Meskipun tentang kebathinan itu sepenuhnya hak pribadi Suharto, tapi memimoin negara dengan pertimbangan klenik ini baru aneh.

Skandal Timor Timur

Setelah 30 tahun lebih merdeka, kawasan Nusantara ini mendapatkan tambahan wilayah. Tentu saja tambahan luas wilayah tersebut bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Bukan pula sebuah proses alam yang menjelmakan daratan seperti dalam film kartun. Sama sekali bukan! Daerah yang dimaksud adalah Timor Timur yang sekarang menjadi propinsi ke-27 RI.

Integrasi Timor Timur bagi rakyat Indonesia dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan positif karena daerah kita bertambah. Negara kita akan semakin kaya. Persoalanku, jika semuanya berjalan dengan wajar, tidak menjadi masalah. Meskipun faktanya dengan cermat disembunyikan, masih ada beberapa yang keluar tanpa kontrol Suharto. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi terjadi di Timor Timur. Ini soal penting yang ingin aku gugat.

Bagaimana dengan rakyat Timor Timur sendiri? Apakah usaha integrasi tersebut berdampak positif bagi rakyat Timor Timur? Apakah dengan masuknya mereka ke Indonesia hak-hak mereka akan terjamin? Ataukah mereka akan mengalami nasib yang sama -- bahkan lebih parah dari kita, rakyat Indonesia? Terlebih penting lagi, berapa nyawa yang melayang sia-sia untuk integrasi tersebut

Suharto sedikitpun tidak merasa bersalah -- membenarkan intervensinya terhadap Rakyat Timor Timur. Meskipun pada saat yang sama dia juga menjanjikan untuk menentukan nasibnya sendiri. Di Negri ini, terlalu sering orang mengobral janji. Terlalu mudah orang berkata-kata dan memberikan harapan pada orang lain. Kata-kata itu, sering tidak terwujud dalam perbuatan, malah bertolak belakang dengan kenyataan bukan hanya sekali saja terjadi. Selama ini, rejim ini menyembunyikan banyak persoalan yang dapat mendirikan bulu kuduk di Timor Timur. Sungguh banyak kerumitan. Upaya Suharto lebih tercurah untuk menghindari tekanan-tekanan internasional, ketimbang secara serius memikirkan nasib rakyat Timtim. Selama ini, dunia internasional belum sepenuhnya menerima integrasi Timtim. Bagaimana mungkin akan mendapat dukungan internasional jika integrasi terlebih dulu melalui linangan air mata dan cucuran darah? Kalaupun ada, dukungan berasal dari negara-negara imperialis yang lebih berkepentingan untuk mengamankan uangnya dan kepentingan politik luar negrinya. Sedangkan plebisit sebagai ukuran penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur dengan sengaja telah dihalang-halangi oleh rejim ini. Jika rejim ini mendapat dukungan dari rakyat Timor Timur, untuk apa dia takut akan plebisit? Bukankah plebisit lebih fair?

Kedatangan Paus Yohanes II ke Timor Timur baru-baru ini telah dimanipulasi pula oleh rejim ini. Kunjungan yang seharusnya untuk kepentingan keagamaan itu telah berubah menjadi media propaganda untuk memobilisasikan dukungan internasional.

Adalah **Carlos Ximenes Bello SDB**, seorang pastur yang menjabat USKUP Lorium, dan wakil Gereja Kristus di Dili, telah menulis surat ke PBB. Isi suratnya berikut akan aku terjemahkan kedalam bahasa Indonesia meminta perhatian dunia internasional agar rakyat Timor Timur terlibat dalam perundingan dalam setiap upaya untuk menentukan nasib rakyat Timor Timur. Surat yang begitu simpati itu oleh rejim Suharto dianggap surat yang tidak bertanggung jawab. Carlos telah menulis sbb:

Saya memberanikan diri menulis surat pada anda untuk memberitahukan bahwa proses dekolonisasi Timor Portugis belum diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah fakta yang seharusnya tidak terlupakan. Kami rakyat Timor, percaya bahwa kami akan diajak berunding menyangkut nasib tanah air kami. Inilah mengapa, sebagai salah seorang yang bertanggung jawab terhadap gereja katolik, dan sebagai seorang warga negara Timor, saya meminta anda melalui surat ini untuk memprakarsai suatu proses dekolonisasi yang lebih normal dan demokratis yang dilakukan melalui suatu referendum. Rakyat Timor harus diajak berunding menyangkut masa depannya melalui sebuah plebesit. Sampai sekarang, rakyat belum pernah diajak berunding. Tetapi orang lain dengan mengatasnamakan rakyat telah mengatakan: Indonesia mengumumkan bahwa rakyat Timor telah memilih integrasi, tetapi rakyat Timor tidak pernah mengatakan seperti itu; Portugal waktu itu mengatakan akan memikirkan masalah ini. Sementara itu, kami saat ini sedang mengalami kematian sebagai rakyat dan sebagai sebuah bangsa.

Anda adalah seorang demokrat dan sahabat hak asasi manusia. Oleh karena itu, tunjukkan dengan tindakan, penghormatan terhadap semangat dan isi piagam PBB yang memberi pada semua rakyat diatas planet ini hak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui cara yang bebas, sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Tidak ada jalan lain yang lebih demokratis untuk memastikan keinginan tertinggi rakyat Timor kecuali melalui sebuah referendum yang diselenggarakan oleh PBB.

Saya mengucapkan terima kasih atas simpati anda untuk rakyat Timor.

Carlos Filipe Ximenes Bello SDB

Pj. Uskup Lorum

Wakil gereja Kristus di Dili

(diambil dari: Inside Indonesia, Bulletin of information Program. Australia, No.20 Oktober 1989.

Kunjungan Paus II ke Timtim, dihadapan jamaah Katolik dalam suatu misa, pemuda-pemuda Timor mengadakan demonstrasi dengan spanduk : **"Kami menolak Integrasi dengan Indonesia"**. Demo itu sempat diabadikan oleh sejumlah wartawan asing, termasuk wartawan Indonesia. Nasib para demonstran itu, hingga kini belum jelas rimbanya.

Pelanggaran hak asasi menjadi hal yang biasa sejak kedatangan tentara Indonesia dan hingga sekarang masih berlangsung. Aku mengutip laporan Amnesty Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Timtim, London tahun 1985. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Sejak invasi militer Indonesia ke Timtim, 200 ribu jiwa penduduk disana telah menjadi korban. Jumlah tersebut kurang lebih 1/3 dari keseluruhan penduduk Timtim sebelum terjadinya invasi militer 7 Desember 1975. Satu diantara tiga penduduk Timtim telah mati dengan sia-sia. Bagian terbesar diantaranya adalah rakyat yang tidak berdosa. Korban dari kepentingan politik sekelompok orang yang haus akan kekuasaan.

Pembantaian besar-besaran telah terjadi di dermaga Dili menyusul terjadinya invasi militer tersebut pada tgl 7 dan 8 Desember 1975. Orang-orang tersebut diikat dan diberi pemberat sebelum diceburkan ke laut.

Pada bulan Agustus 1977 Suharto telah mengumumkan amnesti bagi yang mau menyerah, berupa pengampunan dan jaminan keselamatan. Ternyata, tindakan tersebut demi kepentingan politis rejim saja. Pembunuhan-pembunuhan masih terus saja berlangsung.

Pada Maret-Mei 1979, beberapa kejadian yang sempat terdata adalah:

14 orang dibunuh di Fato Berliu, meskipun sudah menyerah
94 orang dibunuh di Lospalos,
44 orang dibunuh di Kelékai,

118 orang dibunuh hanya dalam waktu antara 15 dan 17 April 1979 di Uatohari, Uatocaraban, Viqueque, Ossu dan Beguia serta di desa-desa sebelah selatan Gunung Matebian.

Pembunuhan besar-besaran terjadi lagi tahun 1981 ketika Operasi Sapu Bersih mulai dilaksanakan. Penangkapan, penyiksaan dan pelenyapan penduduk juga mewarnai masa-masa tersebut. Regim telah membuat sejarah yang suram dan mencoreng muka bangsa kita di dunia Internasional.

Antara April dan September 1981 kurang lebih 3000 orang ditahan. Mereka diasingkan di Pulau Atauro. Di Gunung Aitana telah dibunuh 80 sampai 90 orang di Bulan September 1981. Di Krakas, Viqueque pada Agustus 1983 telah dibunuh pula sedikitnya 200 orang. Antara Pebruari dan Mei 1984 paling tidak 100 orang dibunuh, ditahan dan dilenyapkan dari Desa Hauba dekat Bobonaro; desa Hato Uda dekat Ainaro; daerah Bucoli dan Loi Boro Vai dekat kota Baucau. Sudah rahasia umum bahwa kantor-kantor pemerintah daerah dan militer setempat telah berfungsi pula sebagai tempat interogasi dan tempat penyiksaan. Pemeriksaan dengan cara-cara yang keji adalah hal yang biasa. Antara lain disetrum listrik.

Nasib yang dipenjara-penjara pun tidak lebih baik. Misalnya di Comarca tahanan harus berimpitan-impitan dalam sel yang kotor dan sempit. Penyakit semacam TBC merajalela. Jatah makanan jauh dari mencukupi. Tahanan pun selalu dicekam ketakutan. Eksekusi tanpa proses hukum. Beberapa orang lenyap setelah diambil untuk diinterogasi. Semua ini diungkapkan aktif kembali meskipun secara terbatas. Kejadian tersebut antara bulan Desember 1975 sampai Oktober 1979.

Di Pulau Atauro, sebuah pulau kecil yang panas, lebih dari 4000 orang telah disekap di sana. Dari anak-anak sampai yang tua, baik pria maupun wanita.

Penangkapan besar-besaran juga dilakukan bulan November 1988 yang lalu ketika terjadi kunjungan Suharto ke Dilli. Banyak penduduk Baucau, Lospalos, dan Viqueque, serta Dilli menjadi korban, kurang lebih ada 3000 orang.

Bisakah kita membayangkan terjadinya suatu tindakan yang keji di negeri yang konon berfalsafah Pancasila itu? Di negeri yang kerap mengkampanyekan nilai-nilai kemanusiaan. Realitas ini adalah ironi dan penghianatan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Begitu pula apa yang disebut pasukan sukarelawan yang membantu kelompok nasionalis Timor-Timur. Dalam kenyataannya tidak ada apa yang disebut pasukan sukarelawan. Tentara Indonesia yang dikirim untuk membunuh rakyat Timor-Timur. Betapapun tentara adalah juga manusia.

Meskipun dengan perintah membunuh rakyat Timor Timur banyak dari tentara kita yang tidak siap. Akibatnya, banyak yang gila. Jumlahnya ribuan dan sekarang disebar di sejumlah rumah sakit angkatan darat. Begitu juga rasa frustrasi tentara kita melihat kawan-kawannya gugur. Tentara yang mati setelah jadi abu dan hanya tulangnya baru diserahkan kepada keluarga mereka dengan cara sembunyi-sembunyi.

Masih dalam suasana dimana konflik di Timor Timur belum lagi selesai. Kecaman dunia masih gencar atas intervensi Indonesia. Regim ini bersama Australia malah sibuk membuat perjanjian Celah Timor yang ditandatangani pada 11 Desember 1989 lalu. Alasannya adalah upaya pemanfaatan sumber alam yang ada di Celah Timor. Regim ini harus diakui sangat cerdik mengalihkan perhatian atas kasus real penindasan hak-hak asasi di Timor Timur. Hasil yang langsung dapat kita saksikan bersama adalah bagaimana surutnya tekanan Australia atas integrasi Timor Timur. Tepat setelah treaty ditandatangani. Kita menyaksikan bagaimana kecaman internasional muncul. Australia sendiri seakan-akan tidak mendengar. Keuntungan politis inilah yang telah dimanipulasi sedemikian rupa hingga polemik atas Timtim bergeser pada kerugian atau kekalahan diplomasi Indonesia atas Australia.

Kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, silahkan pelajari kembali data yang aku berikan di atas. Harapanku, agar penilaian yang obyektif dalam memberikan timbangan keadilan.

Dominasi Ajaran Tri Dharma

Suharto kemudian membelah semua partai yang ada dengan meminimalkan jumlah partai. Strategi Suharto seperti ini menyebabkan merosotnya kegiatan politik para birokrat. pa

Bersamaan dengan depolitisasi, dasa warsa pertama orde baru diotandai dengan meenguatnya kembali organisasi-organisasi parokhial dalam bentuk organisasi kekerabatan maupun orga nisasi kedaerahan. Peralihan sarana politik dari partai ke organisasi parokhial seperti ini mungkin dapat mempermudah afiliasi suatu masyarakat politik dengan pemerintah regim Suharto dan, karenanya, dapat melestarikan akses ekonomi- politik masyarakat politik jenis orde baru ini.

Salah satu organisasi parokhial yang kuat dan dekat dengan regim Suharto adalah organisasi kekerabatan yang berasal dari kalangan priyayi atau ningrat. Kenyataan ini muncul bukan karena kepentingan ekonomi politik semata, melainkan juga karena kekerasan kultural.

Organisasi-organisasi kekerabatan muncul sebagai bagian strategi regim Suharto untuk melestarikan kekuasaan dan kewenangannya. Organisasi kekerabatan etnis Jawa sebenarnya pendukung kokohnya regim Suharto. Karena organisasi macam ini memiliki kemampuan pencegahan politik dengan kata lain organisasi kekerabatan Jawa memainkan peran dalam proses stabilisasi nasional yang ditopang oleh integrasi elit.